



# DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

## Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 149 Tangkerang - Pekanbaru 28282

 [disbud.provriau](https://www.instagram.com/disbud.provriau)  [Dinas Kebudayaan Provinsi Riau](https://www.facebook.com/DinasKebudayaanProvinsiRiau)



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2024**

#### **TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB  
KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  
URUSAN

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

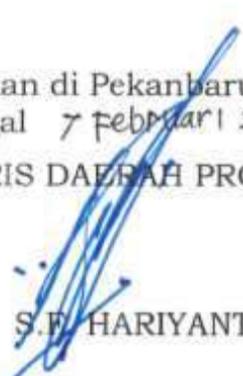
Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNUR RIAU,



EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 4

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan izinnya RENSTRA Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

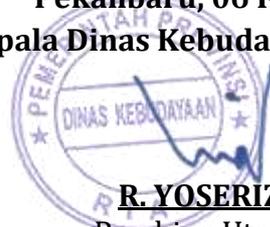
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016, sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Renstra digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2025-2026, serta merupakan dasar dan acuan bagi bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dan Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten/kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Demikian Renstra ini disusun dengan harapan Renstra ini dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

**Pekanbaru, 06 Februari 2024**

**Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**



**R. YOSERIZAL ZEN**

Pembina Utama Madya

NIP. 19681107 199503 1 003

## DAFTAR ISI

|   |               |
|---|---------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ii</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iii</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>v</b>      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>I-1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | I-1           |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....  | I-3           |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | I-6           |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | I-6           |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                              | <b>II-1</b>   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat<br>Daerah .....                 | II-1          |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....  | II-9          |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | II-12         |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....  | II-20         |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT<br/>DAERAH .....</b>            | <b>III-1</b>  |
| 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....                                   | III-1         |
| 3.2 Isu Strategis .....   | III-2         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>  | <b>IV-1</b>   |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah- .....                                      | IV-1          |
| 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....  | IV-1          |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                      | <b>V-1</b>    |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB<br/>KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b> | <b>VI-1</b>   |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                          | <b>VII-1</b>  |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>  | <b>VIII-1</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |               |

## DAFTAR TABEL

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| <b>Tabel 2.1</b>  | Kondisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin .....  | II-9  |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Klasifikasi Pegawai Menurut Eselon .....   | II-9  |
| <b>Tabel 2.3</b>  | Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan .....   | II-9  |
| <b>Tabel 2.4</b>  | Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan Formal .....  | II-9  |
| <b>Tabel 2.5</b>  | Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu .....  | II-10 |
| <b>Tabel 2.6</b>  | Klasifikasi Tenaga Pendukung/Non PNS .....   | II-10 |
| <b>Tabel 2.7</b>  | Ruang yang layak/tidak layak dimiliki UPT .....  | II-11 |
| <b>Tabel 2.8</b>  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2021-2024 ..... | II-13 |
| <b>Tabel 2.9</b>  | Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018- 2023 .....                                 | II-14 |
| <b>Tabel 2.10</b> | Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2023 .....   | II-15 |
| <b>Tabel 2.11</b> | Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2023 .....   | II-16 |
| <b>Tabel 2.12</b> | Data OPK Yang Dimafaatkan Tahun 2020 – 2023 .....  | II-16 |
| <b>Tabel 2.13</b> | Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan di Provinsi Riau Tahun 2023 .....                       | II-17 |
| <b>Tabel 2.14</b> | Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2019-2023 .....            | II-18 |
| <b>Tabel 2.15</b> | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024 .....  | II-20 |
| <b>Tabel 2.16</b> | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2018–2022 .....               | II-23 |
| <b>Tabel 2.17</b> | Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2022 .....  | II-24 |
| <b>Tabel 3.1</b>  | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....                | III-1 |
| <b>Tabel 4.1</b>  | Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.....                                 | IV-1  |
| <b>Tabel 5.1</b>  | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....   | V-1   |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| <b>Tabel 6.1</b> | Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau .....     | VI-4  |
| <b>Tabel 7.1</b> | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026 ..... | VII-2 |

## DAFTAR GAMBAR

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| <b>Gambar 1.1</b> | Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra<br>Perangkat Daerah .....         | I-2   |
| <b>Gambar 1.2</b> | Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen<br>Perencanaan .....                   | I-3   |
| <b>Gambar 2.1</b> | Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan .....                                | II-8  |
| <b>Gambar 2.2</b> | Struktur Organisasi UPT. Museum Sang Nila<br>Utama dan Taman Budaya ..... | II-8  |
| <b>Gambar 2.3</b> | Dimensi Pengukuran IPK .....  | II-22 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam mendukung terlaksananya pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada periode selanjutnya, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Riau perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 bahwa Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Fungsi Renstra adalah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

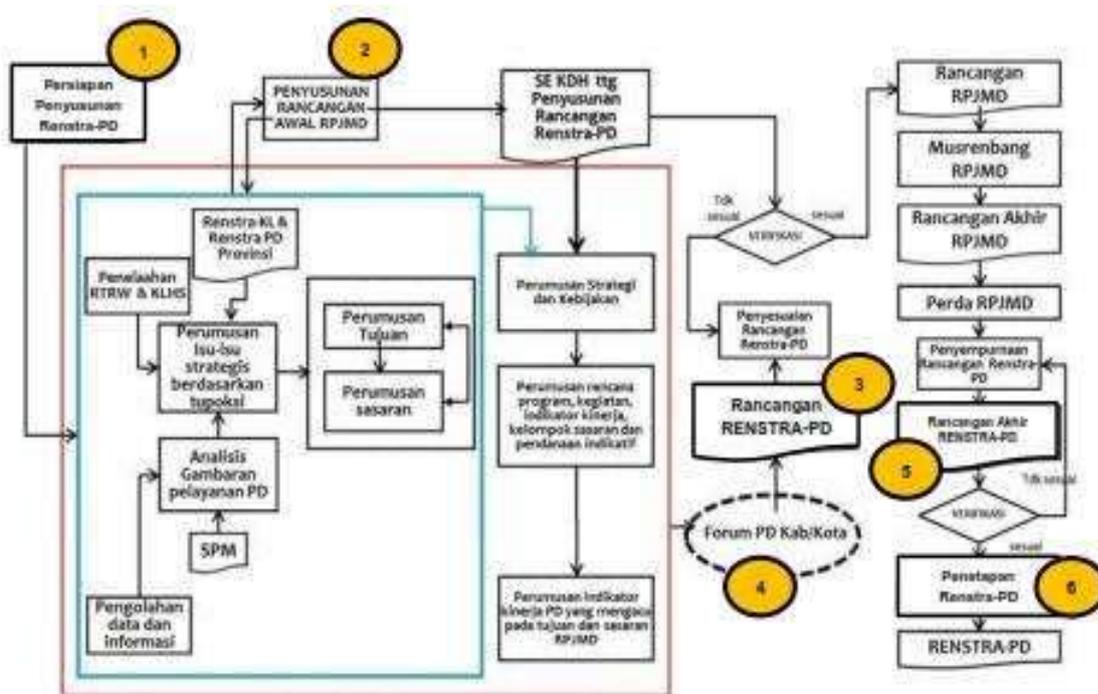
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024, Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Adapun Proses Penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan

Terkait alur tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

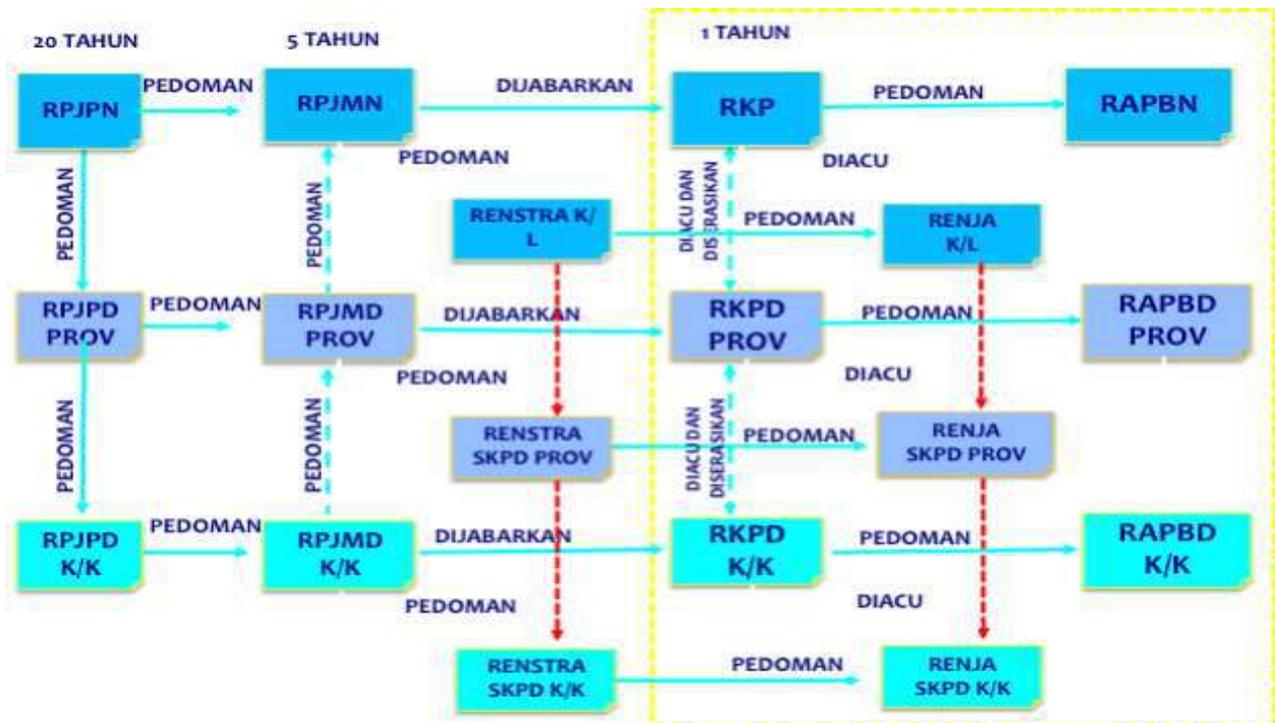
**Gambar 1.1**  
**Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Dalam penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD, Renstra K/L terait, dan Renstra Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota. Untuk melihat keterkaitan dokumen Renstra Perangkat daerah dengan dokumen lainya dapat dilihat pada bagan alir berikut:

Gambar 1.2.

### Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap; Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;

24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam Tahun 2025-2026 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2026;
4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2025 - 2026;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) ini terdiri dari 8 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang memuat gambaran umum penyusunan Dokumen Renstra yang memuat sub-sub tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah seperti Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan dan Isu Strategis memuat tentang Permasalahan dan Isu Strategis yang dialami oleh Perangkat Daerah.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2026 berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau serta NSPK, serta Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan IKK Tahun 2025-2026.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila adanya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini akan disajikan gambaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan diuraikan beberapa hal terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, kondisi sumberdaya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau merupakan dinas daerah provinsi tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pergub Nomor 53 Tahun 2023 diatas serta Pergub Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kebudayaan
2. Sekretariat
3. Bidang Bahasa dan Seni
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan masing-masing unit kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah dibidang kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengemban fungsi :

- 1) Penyusunan dan Perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kebudayaan;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Kebudayaan;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Kebudayaan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain pelaksanaan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **3. Bidang Bahasa dan Seni**

Bidang Bahasa dan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas yang terkait dengan bahasa dan sastra, kesenian, dan seni media.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Bahasa dan Seni;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Bahasa dan Seni;

- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Bahasa dan Seni dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Bahasa dan Seni; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya**

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas yang terkait dengan pelestarian Adat dan Tradisi, Nilai Budaya, Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas yang terkait dengan sejarah, pelestarian cagar budaya, dan permuseuman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 3) pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya**

Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya mempunyai tugas yang terkait dengan diplomasi budaya, pengembangan teknologi budaya, publikasi dan promosi budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 3) pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **7. UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya**

Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:

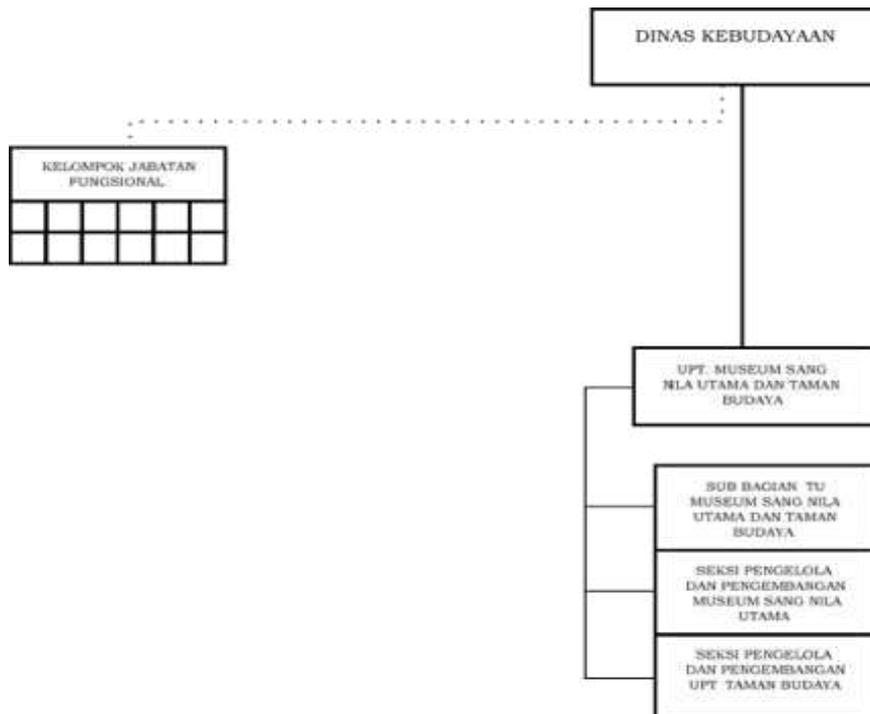
- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasioanal pada UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya;
- 2) Penyelenggaraan pelaksana koordinasi , fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya dapat dilihat pada gambar 2.1. dan 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan



Gambar 2.2  
Struktur Organisasi UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Unit Kerja                     | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 1  | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau | 40          | 36        | 76     |

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai menurut Eselon

| No            | Jenis Kelamin | Eselon |    |     |    | Jumlah |
|---------------|---------------|--------|----|-----|----|--------|
|               |               | I      | II | III | IV |        |
| 1             | Laki-laki     | -      | 1  | 3   | 1  | 5      |
| 2             | Perempuan     | -      | -  | 3   | 3  | 6      |
| <b>JUMLAH</b> |               | -      | 1  | 6   | 4  | 11     |

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

| No            | Jenis Kelamin | Golongan |    |     |    | Jumlah |
|---------------|---------------|----------|----|-----|----|--------|
|               |               | I        | II | III | IV |        |
| 1             | Laki-laki     | 1        | 4  | 22  | 11 | 38     |
| 2             | Perempuan     | -        | 3  | 26  | 9  | 38     |
| <b>JUMLAH</b> |               | 1        | 7  | 48  | 20 | 76     |

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal

| No            | Jenis Kelamin | Pendidikan Formal |      |      |     |      |    |    |    | Jumlah |
|---------------|---------------|-------------------|------|------|-----|------|----|----|----|--------|
|               |               | SD                | SLTP | SLTA | DII | DIII | S1 | S2 | S3 |        |
| 1             | Laki-laki     | 1                 | -    | 8    | -   | 1    | 19 | 14 | -  | 43     |
| 2             | Perempuan     | -                 | 1    | 5    | -   | 1    | 14 | 12 | -  | 33     |
| <b>JUMLAH</b> |               | 1                 | 1    | 13   | -   | 2    | 33 | 26 | -  | 76     |

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.5 Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu

| No            | Unit Kerja                           | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah    |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1             | Pamong Budaya Ahli Madya Kesenian    | 1           | -         | 1         |
| 2             | Pamong Budaya Ahli Madya Permuseuman | 1           | -         | 1         |
| 3             | Pamong Budaya Ahli Madya Kesejarahan | 1           | -         | 1         |
| 4             | Pamong Budaya Ahli Muda Nilai Budaya | -           | 1         | 1         |
| 5             | Pamong Budaya Ahli Muda Cagar Budaya | 1           | -         | 1         |
| 6             | Pamong Budaya Ahli Muda              | 5           | 6         | 11        |
| 7             | JFT Analis Kebijakan                 | 1           | -         | 1         |
| 8             | JFT Perencana Muda                   | 1           | -         | 1         |
| 9             | Arsiparis Ahli Pertama               | 1           | -         | 1         |
| 10            | Pustakawan Muda                      | -           | 1         | 1         |
| <b>JUMLAH</b> |                                      | <b>12</b>   | <b>8</b>  | <b>20</b> |

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.6 Klasifikasi Tenaga Pendukung/ Non PNS

| No            | Tenaga Pendukung/ Non Pns | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah     |
|---------------|---------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1             | Tenaga Operator Komputer  | 31          | 19        | 50         |
| 2             | Tenaga Akuntan            | -           | 2         | 2          |
| 3             | Cleaning Service          | 10          | 14        | 24         |
| 4             | Security                  | 30          | 1         | 31         |
| <b>JUMLAH</b> |                           | <b>71</b>   | <b>36</b> | <b>107</b> |

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Saat ini kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terletak di Jalan Jendral Sudirman No.194 Pekanbaru. Pada awalnya merupakan sarana yang merupakan bagian dari kompleks Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, dimana kantor dinas menggunakan sebagian sarana dan prasarana museum. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik dikantor

Dinas Kebudayaan maupun di UPT masih belum memenuhi standarisasi fungsi dan tugasnya terutama untuk UPT. Adapun Kondisi Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Kondisi Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>JUMLAH</b>         | <b>KONDISI</b> |
|-----------|---|-----------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>              | <b>4</b>       |
| 1         | Tanah Bangunan  | 37,540 M <sup>2</sup> | Layak          |
| 2         | Bangunan Gedung Kantor  | 2                     | Layak          |
| 3         | Bangunan Gedung Utama Museum Sang Nila Utama                    | 1                     | Layak          |
| 4         | Bangunan Gedung Kantor Museum/Ruang Storage                     | 1                     | Layak          |
| 5         | Bangunan Rumah Musik Sulaiman Syafii'                           | 1                     | Layak          |
| 6         | Bangunan Rumah Singgah Selaso Jatuh Kembar                      | 1                     | Layak          |
| 7         | Bangunan Panggung Terbuka Otong Lenon                           | 1                     | Layak          |
| 8         | Bangunan Rumah Panggung Museum/Taman Gemala                     | 1                     | Layak          |
| 9         | Bangunan Gedung Teater Terbuka Husni Thamrin                    | 1                     | Layak          |
| 10        | Bangunan Gedung Teater Terbuka Bustamam Halimi                  | 1                     | Layak          |
| 11        | Bangunan Gedung Olah Seni (GOS) Ediruslan Pe Amanriza           | 1                     | Tidak layak    |
| 12        | Bangunan Gedung Rumah Seni Rupa Amrin Sabrin                    | 1                     | Tidak layak    |
| 13        | Bangunan Gedung Rumah Teater Rumah Kemantan                     | 1                     | Layak          |
| 14        | Bangunan Gedung Sanggar Tari Umar Umayyah                       | 1                     | Layak          |
| 15        | Bangunan Gedung Mess/Wisma Rus Abrus                            | 1                     | Layak          |
| 16        | Bangunan Gedung Tempat Ibadah                                   | 2                     | Layak          |
| 17        | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Aula Museum M. Yazid bin Tomel | 1                     | Layak          |
| 18        | Bangunan Gedung Perpustakaan Ibrahim Sattah                     | 1                     | Layak          |
| 19        | Bangunan Gedung Pos Jaga  | 3                     | Layak          |

Sumber Data: Kartu Inventaris Barang (KIB) 2023 Disbud Prov. Riau

Kekurangan ruangan untuk UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya disebabkan karena dengan terbentuknya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pada tahun 2017, sehingga sebagian ruangan yang semula digunakan untuk pelayanan museum dialih fungsikan untuk ruang kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, hal ini juga sebenarnya berpengaruh terhadap akreditasi museum.

Sesuai standarisasi dan fungsi UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, sarana dan prasarana yang belum dimiliki adalah sebagai berikut

- Ruang Kurator;
- Ruang Edukatif untuk pelajar dan mahasiswa;
- Ruang Konservasi dan Preparasi

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra Periode Sebelumnya**

Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2023 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sesuai Tabel T-C.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

**Tabel 2.8 (T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2024**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun |       |       |      | Rasio Capaian (%) pada Tahun |       |        |      |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|------|------------------------------|-------|--------|------|
|    |  |             |            |                          | 2021                                  | 2022  | 2023  | 2024  | 2021                    | 2022  | 2023  | 2024 | 2021                         | 2022  | 2023   | 2024 |
| 1  | 2  | 3           | 4          | 5                        | 6                                     | 7     | 8     | 9     | 10                      | 11    | 12    | 13   | 14                           | 15    | 16     | 17   |
| 1  | Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau                     |             |            |                          | 18.18                                 | 27.27 | 36.36 | 45.45 | 18.18                   | 27.27 | 36.36 | -    | 100                          | 100   | 100    | -    |
|    | - Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi            |             |            |                          | 74.10                                 | 76.20 | 78.30 | 80.40 | 71.08                   | 72.02 | 79.74 | -    | 95,92                        | 94,51 | 101.84 | -    |
|    | - Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan          |             |            |                          | 4.00                                  | 6.00  | 8.00  | 10.00 | 4.96                    | 5.22  | 6.35  | -    | 124.02                       | 87.05 | 79.38  | -    |
|    | - Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan          |             |            |                          | 3.00                                  | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 2.05                    | 2.15  | 5.25  | -    | 68.33                        | 53,75 | 105.00 | -    |

Dari Tabel 2.8 diatas dapat dilihat indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau adalah Proses Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi guna melindungi OPK dari tergerusnya Zaman, sebagai mana tertuang dalam Rencana Induk Pemajuan Budaya Melayu Tahun 2019-2023.
2. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau adalah Proses Menghidupkan Ekosistem Kebudayaan, Meningkatkan, Memperkaya dan Menyebarkan segala hal yang berkaitan dengan Kebudayaan Melayu.
3. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau adalah Pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan serta mewujudkan Tujuan Nasional dengan membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Meningkatkan Peran Aktif dan Pengaruh Indonesia dalam Hubungan Internasional.

Selanjutnya secara ringkas data OPK berdasarkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dan perkembangannya sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9  
Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018- 2023

| No | Obyek Pemajuan Kebudayaan | Tahun |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|    |                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Tradisi Lisan             | 158   | 158  | 160  | 305  | 240  | 429  |
| 2  | Manuskrip                 | 41    | 41   | 43   | 73   | 94   | 94   |
| 3  | Adat Istiadat             | 65    | 65   | 65   | 146  | 191  | 212  |
| 4  | Ritus                     | 273   | 273  | 273  | 385  | 431  | 431  |
| 5  | Pengetahuan Tradisional   | 385   | 385  | 385  | 844  | 995  | 996  |
| 6  | Teknologi Tradisional     | 189   | 189  | 189  | 403  | 506  | 507  |
| 7  | Seni                      | 370   | 370  | 370  | 538  | 588  | 600  |
| 8  | Bahasa                    | 74    | 74   | 74   | 74   | 128  | 128  |
| 9  | Permainan Rakyat          | 219   | 219  | 219  | 255  | 273  | 283  |
| 10 | Olahraga Tradisional      | 44    | 44   | 44   | 68   | 86   | 88   |

|               |                                     |              |              |              |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11            | Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi | 1.452        | 1.482        | 1.988        | 1988         | 2424         | 2489         |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>3.270</b> | <b>3.300</b> | <b>3.810</b> | <b>5.079</b> | <b>6.136</b> | <b>6.257</b> |

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2023

Unsur pemajuan kebudayaan terklasifikasi ke dalam 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan ditambah 1 (satu) obyek berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara keseluruhan upaya pemajuan kebudayaan meliputi 11 OPK yang terdiri atas (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) kesenian, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya, terkait ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan yang datanya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.10  
Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2023

| No            | OPK                                 | Pelindungan |             |             |             | Pertumbuhan (%) |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|               |                                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |                 |
| 1             | Tradisi Lisan                       | 112         | 119         | 122         | 125         | 0,037           |
| 2             | Manuskrip                           | 30          | 32          | 33          | 34          | 0,043           |
| 3             | Adat Istiadat                       | 46          | 48          | 50          | 51          | 0,035           |
| 4             | Ritus                               | 191         | 202         | 208         | 214         | 0,025           |
| 5             | Pengetahuan Tradisional             | 270         | 285         | 293         | 302         | 0,038           |
| 6             | Teknologi Tradisional               | 132         | 140         | 144         | 148         | 0,039           |
| 7             | Seni                                | 259         | 274         | 282         | 290         | 0,038           |
| 8             | Bahasa                              | 52          | 55          | 56          | 58          | 0,037           |
| 9             | Permainan Rakyat                    | 153         | 162         | 167         | 172         | 0,040           |
| 10            | Olahraga Tradisional                | 31          | 33          | 34          | 34          | 0,048           |
| 11            | Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi | 1392        | 1474        | 1515        | 1557        | 0,038           |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>2667</b> | <b>2824</b> | <b>2904</b> | <b>3038</b> | <b>0,047</b>    |

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau , 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan Tahun 2023 dari 3810 Data OPK telah Dilindungi sebanyak 3038 Data OPK atau 79,74 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,047 persen.

Tabel 2.11  
Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2023

| No | OPK                                 | Pengembangan |      |      |      | Pertumbuhan (%) |
|----|-------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------|
|    |                                     | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 |                 |
| 1  | Tradisi Lisan                       | 3            | 6    | 10   | 13   | 0,66            |
| 2  | Manuskrip                           | 1            | 2    | 3    | 3    | 0,75            |
| 3  | Adat Istiadat                       | 1            | 3    | 4    | 5    | 0,86            |
| 4  | Ritus                               | 5            | 11   | 16   | 22   | 0,68            |
| 5  | Pengetahuan Tradisional             | 8            | 16   | 23   | 31   | 0,60            |
| 6  | Teknologi Tradisional               | 4            | 8    | 11   | 15   | 0,58            |
| 7  | Seni                                | 7            | 15   | 22   | 30   | 0,66            |
| 8  | Bahasa                              | 1            | 3    | 4    | 6    | 0,94            |
| 9  | Permainan Rakyat                    | 4            | 9    | 13   | 18   | 0,69            |
| 10 | Olahraga Tradisional                | 1            | 2    | 3    | 4    | 0,61            |
| 11 | Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi | 40           | 80   | 119  | 95   | 0,43            |
|    | <b>Jumlah</b>                       | 76           | 153  | 229  | 242  | 0,52            |

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau , 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan Tahun 2023 dari 3810 Data OPK telah dikembangkan sebanyak 242 Data OPK atau 6,35 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,52 persen.

Tabel 2.12  
Data OPK Yang Dimafaatkan Tahun 2020 – 2023

| No | OPK                     | Pemanfaatan |      |      |      | Pertumbuhan (%) |
|----|-------------------------|-------------|------|------|------|-----------------|
|    |                         | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 |                 |
| 1  | Tradisi Lisan           | 3           | 5    | 6    | 8    | 0,40            |
| 2  | Manuskrip               | 1           | 1    | 2    | 2    | 1,00            |
| 3  | Adat Istiadat           | 1           | 2    | 3    | 4    | 0,61            |
| 4  | Ritus                   | 5           | 8    | 11   | 15   | 0,45            |
| 5  | Pengetahuan Tradisional | 8           | 12   | 16   | 20   | 0,36            |
| 6  | Teknologi Tradisional   | 4           | 6    | 8    | 11   | 0,30            |
| 7  | Seni                    | 7           | 11   | 15   | 20   | 0,42            |
| 8  | Bahasa                  | 1           | 2    | 3    | 5    | 0,72            |
| 9  | Permainan Rakyat        | 4           | 7    | 9    | 12   | 0,46            |
| 10 | Olahraga Tradisional    | 1           | 1    | 2    | 3    | 0,75            |

| No | OPK                                 | Pemanfaatan |      |      |      | Pertumbuhan (%) |
|----|-------------------------------------|-------------|------|------|------|-----------------|
|    |                                     | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 |                 |
| 11 | Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi | 40          | 60   | 80   | 100  | 0,36            |
|    | <b>Jumlah</b>                       | 76          | 115  | 153  | 200  | 0,38            |

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan Tahun 2023 dari 3810 Data OPK telah dimanfaatkan sebanyak 200 Data OPK atau 5,25 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,38 persen.

Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK, juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/ pemerhati kebudayaan. Sebaran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13  
Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan  
di Provinsi Riau Tahun 2023

| No | Kabupaten/Kota   | SDM        | Lembaga    | Sarana Prasarana |
|----|------------------|------------|------------|------------------|
| 1  | Kuantan Singingi | 8          | 72         | N/A              |
| 2  | Indragiri Hulu   | 85         | 110        | N/A              |
| 3  | Indragiri Hilir  | 9          | 77         | 1                |
| 4  | Pelalawan        | 15         | 47         | N/A              |
| 5  | Siak             | 25         | 33         | 3                |
| 6  | Kampar           | 11         | 51         | 1                |
| 7  | Rokan Hulu       | 17         | 17         | 5                |
| 8  | Rokan Hilir      | 15         | 26         | 4                |
| 9  | Bengkalis        | 25         | 96         | 1                |
| 10 | Kep. Meranti     | 10         | 79         | 5                |
| 11 | Pekanbaru        | 9          | 59         | 10               |
| 12 | Dumai            | 4          | 42         | 3                |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>233</b> | <b>709</b> | <b>33</b>        |

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang telah diidentifikasi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 233 orang. Namun hingga saat ini dari sejumlah SDM tersebut, belum dapat diidentifikasi jumlah orang yang telah mendapat sertifikasi keahlian dan diakui kompetensinya. Untuk jumlah lembaga kebudayaan yang terdiri atas Lembaga Adat Melayu, Dewan Kesenian, dan sanggar/komunitas/organisasi kebudayaan berjumlah 709 lembaga kebudayaan. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdiri atas museum, taman budaya, gedung balai kerapatan adat, gedung atau panggung seni, perpustakaan, dan bioskop berjumlah 33 sarana dan lembaga pengelolanya. Upaya pemajuan terhadap keberadaan SDM, lembaga dan sarana prasarana dalam bidang kebudayaan perlu menjadi perhatian khusus. Upaya sertifikasi, workshop, seminar, fasilitasi program dan operasional, serta upaya optimalisasi dan pembangunan sarana prasarana baru perlu menjadi prioritas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya perlindungan status OPK sebagai bagian dari kebudayaan Melayu Riau. Dari tahun 2013 hingga tahun 2023 Provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan nasional terhadap 66 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan 105 Cagar Budaya/OPK Bendawi. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya selama kurun waktu 2019-2023 serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah OPK yang ada, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14  
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya  
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| No | Uraian                                    | Tahun    |      |      |      |      |
|----|---|----------|------|------|------|------|
|    |   | 2019     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | OPK Non Bendawi                           | 1822 OPK |      |      |      |      |
|    | Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) | 6        | 10   | 5    | 8    | 2    |
|    | • Persentase                              | 0,33     | 0,55 | 0,27 | 0,44 | 0,11 |

| No | Uraian                   | Tahun     |      |      |      |      |
|----|--------------------------|-----------|------|------|------|------|
|    |                          | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2  | OPK Bendawi              | 1.988 OPK |      |      |      |      |
|    | • Penetapan Cagar Budaya | 19        | -    | -    | 25   | 12   |
|    | • Persentase             | 0,96      | -    | -    | 1,26 | 0.60 |

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2023

Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya. Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2023 yang disajikan berdasarkan T-C.24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel 2.15 yang menyajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.15 (T-C.24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024**

| No | Uraian  | Anggaran pada Tahun ke- |                       |                       |                       | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |                       |                       |          | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |               |               |          | Rata-rata Pertumbuhan (%) |              |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|---------------|---------------|----------|---------------------------|--------------|
|    |   | 2021                    | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2021                             | 2022                  | 2023                  | 2024     | 2021  | 2022          | 2023          | 2024     | Anggaran                  | Realisasi    |
| 1  | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                                | 8                     | 9                     | 10       | 11  | 12            | 13            | 14       | 15                        | 16           |
|    | <b>BERDASARKAN JENIS BELANJA</b>                      |                         |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |          |   |               |               |          |                           |              |
| 1  | Belanja Tidak Langsung                                | 13.319.906.762,00       | 14.357.708.218,00     | 14.755.596.977        | 15.621.746.588        | 13.228.757.143                   | 13.564.731.233        | 14.529.013.855        | -        | 99,32%  | 94,48%        | 98,46%        | -        | 5,28                      | 4,82         |
| 2  | Belanja Langsung                                      | 15.117.118.077          | 26.269.698.878        | 22.004.322.610        | 27.868.766.707        | 13.770.238.973                   | 22.942.425.846        | 20.229.526.079        | -        | 91,09%  | 87,33%        | 91,93%        | -        | 28,77                     | 27,39        |
|    | a. Belanja Modal                                      | 997.236.612             | 1.344.076.460         | 854.347.723           | 952.656.874           | 330.892.000                      | 1.056.591.480         | 849.004.607           | -        | 33,18%  | 78,61%        | 99,37%        | -        | 0,83                      | 99,83        |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                            | 9.119.881.465           | 18.925.622.418        | 16.149.974.887        | 20.916.109.833        | 8.439.346.973                    | 16.325.503.585        | 14.427.987.734        | -        | 92,54%  | 86,26%        | 89,34%        | -        | 46,43                     | 40,91        |
|    | c. Belanja Hibah                                      | 5.000.000.000,00        | 6.000.000.000         | 5.000.000.000         | 6.000.000.000         | 5.000.000.000                    | 5.560.330.781         | 4.952.533.738         | -        | 100,00%                                       | 92,67%        | 99,05%        | -        | 1,67                      | 0,14         |
|    | <b>TOTAL PER TAHUN</b>                                | <b>28.437.024.839</b>   | <b>40.627.407.096</b> | <b>36.759.919.587</b> | <b>43.490.513.295</b> | <b>26.998.996.116</b>            | <b>36.507.157.079</b> | <b>34.758.539.934</b> | <b>-</b> | <b>95,20%</b>                                 | <b>90,91%</b> | <b>95,20%</b> | <b>-</b> | <b>17,03</b>              | <b>16,11</b> |
|    | <b>BERDASARKAN PROGRAM</b>                            |                         |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |          |   |               |               |          |                           |              |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 17.450.582.484          | 20.434.847.617        | 20.931.699.187        | 21.731.141.258        | 17.118.962.286                   | 19.185.510.165        | 20.301.876.245        | -        | 98,10%  | 93,89%        | 96,99%        | -        | 2,01                      | 8,95         |
| 2  | Program Pengembangan Kebudayaan                       | 7.956.627.237           | 10.947.212.391        | 10.431.293.857        | 13.433.370.236        | 7.765.984.923                    | 9.622.675.879         | 10.062.066.281        | -        | 97,60%  | 87,90%        | 96,46%        | -        | 14,55                     | 14,24        |
| 3  | Program Pengembangan Kesenian Tradisional             | 95.633.930              | 1.400.264.661         | 131.083.906           | 1.385.729.582         | 95.633.930                       | 1.346.306.454         | 115.838.280           | -        | 100,00%                                       | 96,15%        | 88,37%        | -        | 484,93                    | 608,19       |
| 4  | Program Pembinaan Sejarah                             | 326.762.853             | 664.097.973           | 0                     | 0                     | 326.142.853                      | 548.275.443           | 0                     | -        | 99,81%  | 82,56%        | 0%            | -        | 1,62                      | 15,95        |
| 5  | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya      | 609.965.639             | 4.855.875.970         | 2.474.418.520         | 3.803.512.643         | 517.367.404                      | 3.983.202.118         | 2.120.788.887         | -        | 84,82%  | 82,03%        | 85,71%        | -        | 30,09                     | 311,57       |
| 6  | Program Pengelolaan Permuseuman                       | 1.997.452.696           | 2.325.108.484         | 2.791.424.117         | 3.136.759.576         | 1.174.904.720                    | 1.821.187.020         | 2.157.970.241         | -        | 58,82%  | 78,33%        | 77,31%        | -        | 6,37                      | 36,75        |

Catatan: untuk realisasi 2023 berdasarkan proyeksi data per 31 Desember 2023

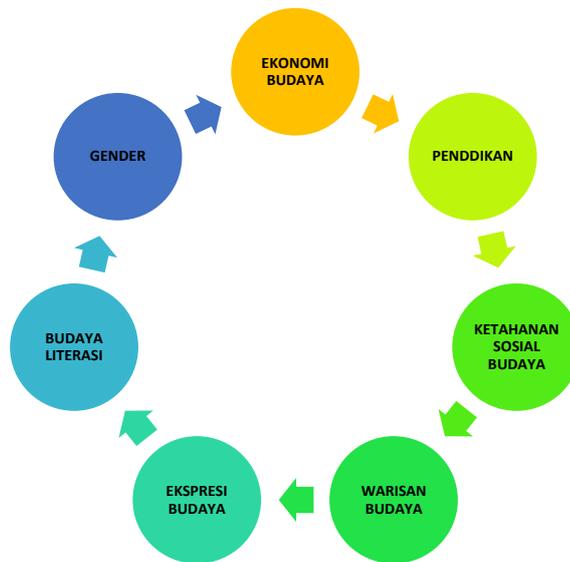
Dari Tabel 2.15 diatas dapat dilihat terdapat kenaikan anggaran dari tahun 2021, 2022 dan 2024, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan anggaran, dimana anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 28.437.024.839 naik menjadi Rp. 40.627.407.096 pada tahun anggaran 2022. Untuk tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 36.759.919.587. Sedangkan untuk tahun 2024 mengalami kenaikan Rp. 43.490.513.295. Untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah 95,20%, mengalami penurunan menjadi 90,91% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 95,20%, hal ini disebabkan karena progres fisik yang bisa berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, dibandingkan pada tahun sebelumnya banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan banyak kendala, antara lainnya waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan kegiatan, Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala. Untuk tahun 2024 realisasi anggaran masih belum bisa dihitung dikarenakan masih dalam proses tahun berjalan. Dari segi Pendanaan Anggaran Sudah terakomodir sesuai kebutuhan Dinas, namun saat tahun berjalan terdapat beberapa kendala sehingga menyebabkan progress fisik tidak berjalan dan anggaran tidak dapat terserap. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan sehingga realisasi dapat dicapai secara maksimal. Adapun yang tidak kalah penting adalah melakukan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan juga arah, kebijakan dan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

### **2.3.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau**

IPK disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang di antaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK), ekosistem kebudayaan dan pengarusutamaan kebudayaan dari hulu ke hilir. IPK ini juga menjadi indeks pengukuran yang dapat secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah di berbagai wilayah nusantara.

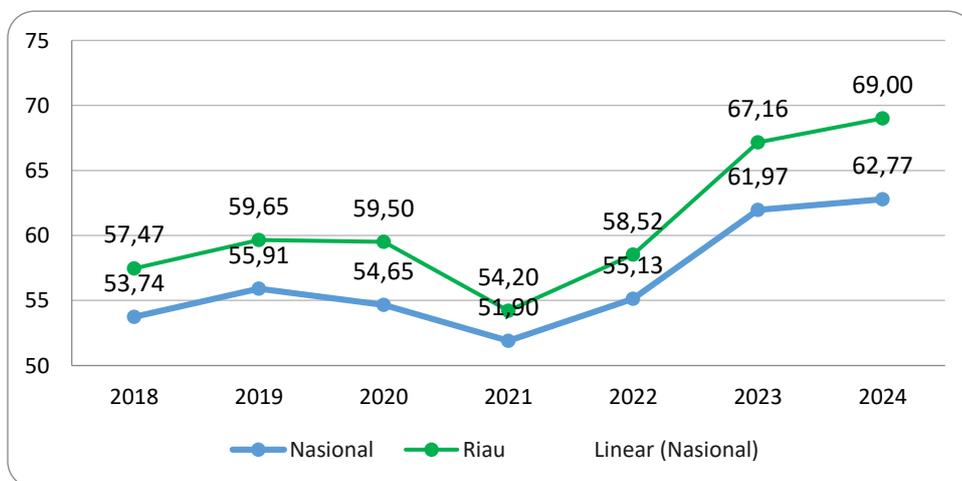
IPK juga digunakan sebagai indikator pembangunan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020-2024. RPJMN keempat yang bertemakan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” ini memiliki tujuh prioritas. Satu di antaranya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ruang lingkup perhitungannya memiliki 7 dimensi pengukuran dan 31 indikator.

Gambar 2.3  
Dimensi Pengukuran IPK



Secara nasional capaian indeks pemajuan kebudayaan Provinsi Riau cukup baik, dari tahun 2018 sd 2022 capaiannya di atas rata-rata capaian nasional.

Diagram 2.1  
IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi Riau



Sumber Data : Kemdikbud tahun 2023

IPK dibentuk melalui tujuh dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.16  
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional  
Tahun 2018–2022

| No.               | Dimensi                 | Bobot Dimensi | Nilai 2018 | Nilai 2019 | Nilai 2020 | Nilai 2021 | Nilai 2022 |
|-------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| D1                | Ekonomi Budaya          | 0.10          | 45.76      | 48.32      | 42.45      | 26.35      | 39.34      |
| D2                | Pendidikan              | 0.20          | 72.63      | 77.23      | 75.29      | 74.27      | 76.22      |
| D3                | Ketahanan Sosial Budaya | 0.20          | 74.84      | 75.41      | 75.64      | 70.07      | 73.88      |
| D4                | Warisan Budaya          | 0.25          | 44.03      | 45.91      | 48.00      | 47.47      | 51.75      |
| D5                | Ekspresi Budaya         | 0.10          | 35.10      | 36.13      | 36.05      | 22.31      | 25.39      |
| D6                | Budaya Literasi         | 0.10          | 58.20      | 61.90      | 65.25      | 56.39      | 61.92      |
| D7                | Gender                  | 0.05          | 61.14      | 60.24      | 58.82      | 59.20      | 57.91      |
| IPK Provinsi Riau |                         |               | 57.47      | 59.65      | 59.50      | 54.20      | 58.52      |
| IPK Nasional      |                         |               | 53,74      | 55,91      | 54,65      | 51,90      | 55,13      |

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI

IPK Riau periode sebelum pandemi Covid 19 meningkat dari 57,47 pada 2018 menjadi 59,65 pada 2019. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan hampir di seluruh dimensi pembentuknya, kecuali Dimensi Gender. Dimensi Pendidikan tumbuh paling tinggi sebesar 6,34% menjadi 77,23 pada periode yang sama. Sementara itu, Dimensi Gender mengalami penurunan sebesar 1,47% menjadi 60,24

Pada tahun pertama Pandemi Covid, skor IPK Riau cenderung stabil meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 0,25%. Peringkatnya meningkat ke posisi 4. Namun, pada tahun kedua pandemi skor IPK Riau menurun cukup tajam, yakni sebesar 8,91% menjadi 54,20. Pada tahun ini peringkatnya turun ke posisi 8. Hampir seluruh dimensi pembentuknya menurun, kecuali Dimensi Gender. Dimensi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Budaya Literasi.

Memasuki periode Pasca Pandemi, skor IPK Riau mengalami perbaikan. Skor IPK berhasil meningkat sebanyak 4 poin menjadi 58,52, diiringi dengan meningkatnya hampir seluruh dimensi pembentuk, kecuali Dimensi Gender yang

mengalami sedikit penurunan. Dimensi yang mengalami peningkatan paling besar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya. Perbaikan skor IPK pada periode ini juga ditunjukkan dengan peningkatan peringkat Riau, yakni menduduki peringkat 4 secara nasional.

Tabel 2.17  
Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2022

| Tahun | IPK      |       | Peringkat Nasional | Peringkat Sumatera |
|-------|----------|-------|--------------------|--------------------|
|       | Nasional | Riau  |                    |                    |
| 2018  | 53,74    | 57,47 | 7                  | -                  |
| 2019  | 55,91    | 59,65 | 7                  | -                  |
| 2020  | 54,65    | 59,50 | 4                  | 1                  |
| 2021  | 51,90    | 54,20 | 8                  | 2                  |
| 2022  | 55,13    | 58,52 | 4                  | 1                  |

Sumber Data : Kemdikbud Tahun 2023

#### 2.4 Kelompok Sasaran layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau periode 2025 – 2026 adalah :

1. Lembaga Adat Melayu Riau
2. Dewan Kesenian Riau
3. Lembaga kebudayaan tingkat provinsi
4. Sanggar Kesenian
5. Pelaku Budaya
6. Pelaku Kesenian
7. Dinas terkait Kabupaten/Kota

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kebudayaan Provinsi Riau serta berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dikelompokkan dalam aspek kebudayaan.

Pengoptimalan pelestarian warisan budaya merupakan isue penting. Kondisi kekinian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak Data Objek Pemajuan Kebudayaan (Data OPK) yang belum dilestarikan secara optimal. Oleh karena itu optimalisasi pelestarian budaya melayu wajib menjadi pertimbangan kebijakan kedepannya.

Selanjutnya identifikasi permasalahan berdasarkan hasil perumusan menggunakan tabel T-B.35 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
 Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok                                | Masalah  | Akar Masalah   |
|-----|--|--|--|
| 1   | Belum Optimalnya Pemajuan Budaya Melayu Riau | 1. Belum optimalnya penyelamatan objek pemajuan kebudayaan | 1. Masih kurangnya inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan<br>2. Masih kurangnya pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan<br>3. Masih kurangnya pengamanan data objek pemajuan kebudayaan<br>4. Masih kurangnya publikasi data objek pemajuan kebudayaan |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 2. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekspresi budaya melayu | 1. Masih kurangnya kapasitas lembaga/ organisasi budaya<br>2. Masih kurangnya penyelenggaraan event kebudayaan |
|  |  | 3. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan warisan budaya melayu  | 1. Masih kurangnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya                                   |

### 3.2 Isu Strategis

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 bahwa pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah ke dalam seluruh proses pembangunan, Isu-isu strategis gender dalam Pembangunan kebudayaan adalah :

1. Peningkatan fasilitas pendukung terkait penyediaan Sarana dan Prasarana untuk penyandang Disabilitas di Lingkunga Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
2. Peningkatan akses masyarakat dari semua kalangan terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan dan objek pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan telaahan faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, isu strategis urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
3. Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
4. Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/ kolaborasi;
5. Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau;

6. Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.
7. Mengoptimalkan aspek ekonomi kebudayaan dalam Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2026 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Adapun rumusan tujuan, dan sasaran serta indikator dan target mengacu pada tabel T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 4.1 :

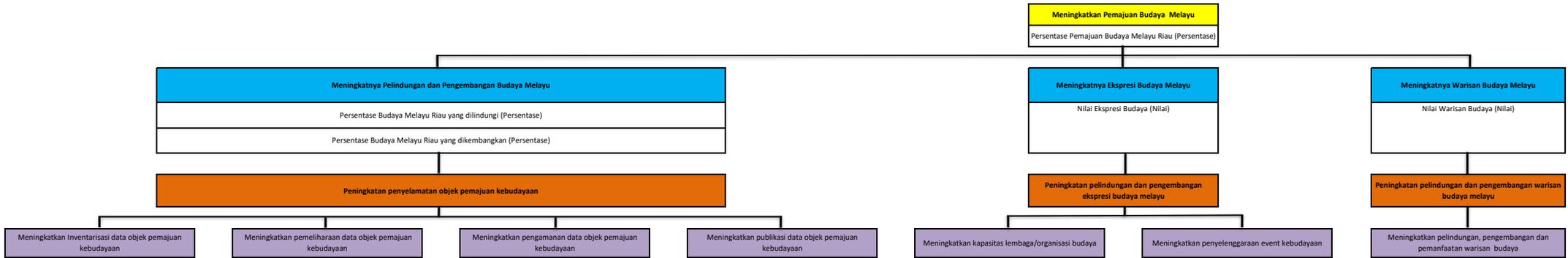
Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2025-2026

| No | Tujuan                              | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran                        | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun |        |
|----|-------------------------------------|---|---|--|--------|
|    |                                     |   |   | 2025                                     | 2026   |
| 1  | 2                                   | 3   | 4   | 5  | 6      |
|    | Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu |   | Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau          | 54,54%                                   | 63,63% |
|    |                                     | Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu | Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi   | 82,50%                                   | 84,60% |
|    |                                     |   | Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan | 12,00%                                   | 14,00% |
|    |                                     | Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu                     | Nilai Ekspresi Budaya                           | 47,69                                    | 49,18  |
|    |                                     | Meningkatnya Warisan Budaya Melayu                      | Nilai Warisan Budaya                            | 57,40                                    | 58,90  |

#### 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja perangkat daerah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan tujuan, sasaran, outcome, dan output serta, indikatornya masing-masing. Adapun cascading kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 sebagai berikut ini :

### CASCADING DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan kebudayaan juga disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengelolaan kebudayaan terkait dengan cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis. Telaah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Provinsi Riau.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026, Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana format tabel T-C.26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| <b>ISU STRATEGIS</b>  |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;</li><li>3. Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;</li><li>4. Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;</li><li>5. Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau;</li><li>6. Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.</li><li>7. Mengoptimalkan aspek ekonomi kebudayaan dalam Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.</li></ol> |

| <b>TUJUAN</b>                       | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu | Meningkatnya perlindungan dan pengembangan Budaya Melayu | Peningkatan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan</li> <li>2. Meningkatkan pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan</li> <li>3. Meningkatkan pengamanan data objek pemajuan kebudayaan</li> <li>4. Meningkatkan publikasi data objek pemajuan kebudayaan</li> </ol> |
|                                     | Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu                      | Peningkatan perlindungan dan pengembangan ekspresi budaya melayu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas lembaga/organisasi budaya</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan event kebudayaan</li> </ol>  |
|                                     | Meningkatnya Warisan Budaya Melayu                       | Peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya melayu  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya</li> </ol>  |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

### **SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini akan disajikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel T-C.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Adapun uraian dari bab ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengembangan Kebudayaan**

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
  - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 3) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

## **3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
  - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

## **4. Program Pembinaan Sejarah**

- 1) Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
- Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal

## **5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
  - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
  - Penetapan Cagar Budaya
- 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
  - Pelindungan Cagar Budaya
  - Pengembangan Cagar Budaya
  - Pemanfaatan Cagar Budaya
  - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
- 3) Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi
  - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi

## **6. Program Pengelolaan Permuseuman**

- 1) Pengelolaan Museum Provinsi
  - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
  - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
  - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
  - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
  - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

Kegiatan dari masing-masing program sebagaimana uraian tersebut diatas mengacu pada tabel T-C.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan  
Provinsi Riau

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan               | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                 |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra/Perangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                         |        |    |
|--------|---------|-------------------|--|--|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|--|--------------------------------|--------|----|
|        |         |                   |  |  |   | 2025   |                   | 2026            |                   | Target  | Rp                |  |                                | Target | Rp |
|        |         |                   |  |  |   | Target   | Rp                | Target          | Rp                |   |                   |  |                                |        |    |
| 1      | 2       | 3                 | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                 | 9               | 10                | 11  | 12                | 13   | 14                             |        |    |
|        |         | 2.22              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>   |  |   |  | 42.261.600.780,00 |                 | 42.501.037.527,00 |   | 84.762.638.307,00 |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22              | <b>DINAS KEBUDAYAAN</b>  |  |   |  | 36.611.600.780,00 |                 | 36.701.037.527,00 |   | 73.312.638.307,00 |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan                    | 100 Persen  | 100%   | 24.284.872.244,00 | 100%            | 22.924.308.991,00 | 100%  | 47.209.181.235,00 |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | -   | 5 Dokumen                                      | 254.669.110,00    | 5 Dokumen       | 254.669.110,00    | 10 Dokumen  | 509.338.220,00    |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | -   | 5 Dokumen                                      | 254.669.110,00    | 5 Dokumen       | 254.669.110,00    | 10 Dokumen  | 509.338.220,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | 12 Kabupaten/Kota              |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi                                    | 12 Laporan  | 12 Laporan                                     | 15.465.761.271,00 | 12 Laporan      | 15.875.281.228,00 | 24 Laporan  | 31.341.042.499,00 |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 88 Orang/ Bulan                                       | 80 Orang/ Bulan                                | 15.465.761.271,00 | 80 Orang/ Bulan | 15.875.281.228,00 | 160 Orang/ Bulan  | 31.341.042.499,00 | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi  | PM  | 1 Jenis  | 48.000.000,00     | 1 Jenis         | 48.000.000,00     | 2 Jenis   | 96.000.000,00     |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan   | 100 Paket   | 80 Paket                                       | 48.000.000,00     | 80 Paket        | 48.000.000,00     | 160 Paket   | 96.000.000,00     | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi   | PM  | 5 Jenis layanan                                | 902.667.512,00    | 5 Jenis layanan | 752.667.512,00    | 10 Jenis layanan  | 1.655.335.024,00  |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                    | 8 Paket   | 8 Paket  | 54.669.110,00     | 8 Paket         | 54.669.110,00     | 16 Paket  | 109.338.220,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 16 Paket  | 16 Paket                                       | 328.492.124,00    | 16 Paket        | 178.492.124,00    | 32 Paket  | 506.984.248,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 4200 Paket  | 4000 Paket                                     | 86.000.000,00     | 4000 Paket      | 86.000.000,00     | 8000 Paket  | 172.000.000,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 8 Paket   | 8 Paket  | 102.256.278,00    | 8 Paket         | 102.256.278,00    | 16 Paket  | 204.512.556,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 17 Laporan  | 35 Laporan                                     | 331.250.000,00    | 35 Laporan      | 331.250.000,00    | 70 Laporan  | 662.500.000,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | 12 Kabupaten/ Kota, Jakarta    |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan                      | PM  | 3 Jenis Barang                                 | 213.230.211,00    | 3 Jenis Barang  | 713.230.211,00    | 6 Jenis Barang  | 926.460.422,00    |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 17 Unit   | 10 Unit  | 105.230.211,00    | 10 Unit         | 505.230.211,00    | 20 Unit   | 610.460.422,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | -   | 1 Unit   | 108.000.000,00    | 1 Unit          | 208.000.000,00    | 2 Unit  | 316.000.000,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi                                   | 3 Jenis   | 2 Jenis  | 4.583.052.380,00  | 2 Jenis         | 4.683.052.380,00  | 4 Jenis   | 9.266.104.760,00  |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan  | 12 Laporan                                     | 523.880.000,00    | 12 Laporan      | 423.880.000,00    | 24 Laporan  | 947.760.000,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan  | 12 Laporan                                     | 4.059.172.380,00  | 12 Laporan      | 4.259.172.380,00  | 24 Laporan  | 8.318.344.760,00  | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                  | 3 Jenis   | 3 Jenis  | 2.817.491.760,00  | 3 Jenis         | 597.408.550,00    | 6 Jenis   | 3.414.900.310,00  |  |                                |        |    |
|        |         | 2.22.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 8 Unit  | 9 Unit   | 116.861.760,00    | 9 Unit          | 106.861.760,00    | 18 Unit   | 223.723.520,00    | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau |        |    |

| Tujuan                                     | Sasaran   | Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan                 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                         |                     |                         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah |                          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi   |        |    |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|--|--------|----|
|  |   |                   |  |  |   | 2025   |                         | 2026                |                         | Target   | Rp                       |  |  | Target | Rp |
|  |   |                   |  |  |   | Target   | Rp                      | Target              | Rp                      |  |                          |  |  |        |    |
| 1  | 2   | 3                 | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                       | 9                   | 10                      | 11   | 12                       | 13   | 14   |        |    |
|  |   | 2.22.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 1 Unit  | 1 Unit   | 50.000.000,00           | 1 Unit              | 50.000.000,00           | 2 Unit   | 100.000.000,00           | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau                   |        |    |
|  |   | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 112 Unit  | 100 Unit                                       | 94.150.000,00           | 100 Unit            | 94.150.000,00           | 200 Unit   | 188.300.000,00           | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau                   |        |    |
|  |   | 2.22.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit  | 4 Unit   | 2.556.480.000,00        | 2 Unit              | 346.396.790,00          | 6 Unit   | 2.902.876.790,00         | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau                   |        |    |
| <b>MENINGKATKAN PEMAJUAN BUDAYA MELAYU</b> |   |                   |  | <b>Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau</b>  |   | 54,54  |                         | 63,63               |                         | 63,63  |                          |  |  |        |    |
|  | Meningkatnya Pelindungan dan pengembangan Budaya Melayu |                   |  | Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi  |   | 82,50  |                         | 84,60               |                         | 84,60  |                          |  |  |        |    |
|  |   |                   |  | Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan  |   | 12,00  |                         | 14,00               |                         | 14,00  |                          |  |  |        |    |
|  |   | 2.22.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>   | <b>Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan</b>                      | <b>PM</b>   | <b>96 Data OPK</b>                             | <b>8.796.964.958,00</b> | <b>106 Data OPK</b> | <b>9.246.964.958,00</b> | <b>106 Data OPK</b>  | <b>18.043.929.916,00</b> |  |  |        |    |
|  |   | 2.22.02.1.01      | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                  | <b>Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola</b>  | <b>2.15 %</b>   | <b>2,24 %</b>                                  | <b>2.327.911.727,00</b> | <b>2,27 %</b>       | <b>2.777.911.727,00</b> | <b>2,27 %</b>  | <b>5.105.823.454,00</b>  |  |  |        |    |
|  |   | 2.22.02.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan   | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan                          | 8 Objek   | 10 Objek                                       | 1.247.386.722,00        | 11 Objek            | 1.497.386.722,00        | 11 Objek   | 2.744.773.444,00         | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|  |   | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                            | 520 Orang   | 500 Orang                                      | 1.080.525.005,00        | 500 Orang           | 1.280.525.005,00        | 1000 Orang   | 2.361.050.010,00         | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |        |    |
|  |   | 2.22.02.1.02      | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi</b>                                       | <b>Persentase pelestarian kesenian tradisional</b>   | <b>2.15 %</b>   | <b>2,24 %</b>                                  | <b>1.469.053.231,00</b> | <b>2,27 %</b>       | <b>1.469.053.231,00</b> | <b>2,27 %</b>  | <b>2.938.106.462,00</b>  |  |  |        |    |
|  |   | 2.22.02.1.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya   | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan            | 16 Objek  | 10 Objek                                       | 1.165.414.499,00        | 11 Objek            | 1.165.414.499,00        | 11 Objek   | 2.330.828.998,00         | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|  |   | 2.22.2.1.02.0003  | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan         | 12 Sertifikat   | 12 Sertifikat                                  | 303.638.732,00          | 12 Sertifikat       | 303.638.732,00          | 24 Sertifikat  | 607.277.464,00           | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|  |   | 2.22.02.1.03      | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>  | <b>Jumlah Lembaga Adat yang di bina</b>  | <b>-</b>  | <b>1 Lembaga</b>                               | <b>5.000.000.000,00</b> | <b>1 Lembaga</b>    | <b>5.000.000.000,00</b> | <b>2 Lembaga</b>   | <b>10.000.000.000,00</b> |  |  |        |    |
|  |   | 2.22.02.1.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat   | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan        | -   | 1 Objek  | 5.000.000.000,00        | 1 Objek             | 5.000.000.000,00        | 2 Objek  | 10.000.000.000,00        | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|  | Meningkatnya Pelindungan dan pengembangan Budaya Melayu |                   |  | <b>Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi</b>   |   |  |                         |                     |                         |  |                          |  |  |        |    |
|  |   |                   |  | <b>Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan</b>   |   |  |                         |                     |                         |  |                          |  |  |        |    |

| Tujuan | Sasaran                             | Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                         |                    |                         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah |                         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi   |        |    |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|--|--------|----|
|        |                                     |                   |  |  |   | 2025   |                         | 2026               |                         | Target   | Rp                      |  |  | Target | Rp |
|        |                                     |                   |  |  |   | Target   | Rp                      | Target             | Rp                      |  |                         |  |  |        |    |
| 1      | 2                                   | 3                 | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                       | 9                  | 10                      | 11   | 12                      | 13   | 14   |        |    |
|        |                                     | 2.22.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>   | <b>Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan</b>                                       | 2, 15%  | 2,21%  | 285.729.919,00          | 2,24%              | 1.285.729.919,00        | 2,24%  | 1.571.459.838,00        |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.03.1.01      | <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</b>                          | <b>Persentase Pembinaan Kesenian</b>   | <b>100 Persen</b>                                     | <b>100%</b>                                    | <b>285.729.919,00</b>   | <b>100%</b>        | <b>1.285.729.919,00</b> | <b>100%</b>  | <b>1.571.459.838,00</b> |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.03.1.01.0002 | Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi             | -   | 10 Sertifikat                                  | 150.000.000,00          | 10 Sertifikat      | 150.000.000,00          | 20 Sertifikat  | 300.000.000,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.03.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional   | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                             | 24 Lembaga  | 12 Lembaga                                     | 135.729.919,00          | 12 Lembaga         | 1.135.729.919,00        | 24 Lembaga   | 1.271.459.838,00        | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        | Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu |                   |  | Nilai Ekspresi Budaya  |   | 47,69  |                         | 49,18              |                         | 49,18  |                         |  |  |        |    |
|        | Meningkatnya Warisan Budaya Melayu  |                   |  | Nilai Warisan Budaya   |   | 57,40  |                         | 58,90              |                         | 58,90  |                         |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.04           | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>   | <b>Jumlah Sejarah yang dibina</b>  | <b>25 objek</b>                                       | <b>50 Objek</b>                                | <b>459.056.773,00</b>   | <b>50 Objek</b>    | <b>459.056.773,00</b>   | <b>100 Objek</b>   | <b>918.113.546,00</b>   |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.04.1.01      | <b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>  | <b>Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina</b>   | <b>12 Kab/Kota</b>                                    | <b>12 Kab/Kota</b>                             | <b>459.056.773,00</b>   | <b>12 Kab/Kota</b> | <b>459.056.773,00</b>   | <b>24 Kab/ Kota</b>  | <b>918.113.546,00</b>   |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.04.1.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi  | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                | -   | 10 Orang                                       | 100.000.000,00          | 20 Orang           | 150.000.000,00          | 30 Orang   | 250.000.000,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.04.1.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah   | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat                        | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                      | 126.768.773,00          | 1 Dokumen          | 156.768.773,00          | 2 Dokumen  | 283.537.546,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.04.1.01.0004 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal   | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal                    | 3 Dokumen   | 1 Dokumen                                      | 232.288.000,00          | 1 Dokumen          | 152.288.000,00          | 2 Dokumen  | 384.576.000,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        | Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu |                   |  | Nilai Ekspresi Budaya  |   | 47,69  |                         | 49,18              |                         | 49,18  |                         |  |  |        |    |
|        | Meningkatnya Warisan Budaya Melayu  |                   |  | Nilai Warisan Budaya   |   | 57,40  |                         | 58,90              |                         | 58,90  |                         |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.05           | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>  | <b>Jumlah cagar budaya yang dilindungi</b>   | <b>PM</b>   | <b>146 Objek</b>                               | <b>2.784.976.886,00</b> | <b>156 Objek</b>   | <b>2.784.976.886,00</b> | <b>156 Objek</b>   | <b>5.569.953.772,00</b> |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.01      | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>   | <b>Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi</b>                                    | <b>5%</b>   | <b>5%</b>                                      | <b>436.958.744,00</b>   | <b>5%</b>          | <b>436.958.744,00</b>   | <b>10%</b>   | <b>873.917.488,00</b>   |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya  | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan  | 75 Objek  | 20 Objek                                       | 150.000.000,00          | 20 Objek           | 150.000.000,00          | 40 Objek   | 300.000.000,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan  | PM  | 15 Objek                                       | 286.958.744,00          | 15 Objek           | 286.958.744,00          | 30 Objek   | 573.917.488,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.02      | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>   | <b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola</b>                                    | <b>2 Objek</b>  | <b>2 Objek</b>                                 | <b>2.300.000.000,00</b> | <b>2 Objek</b>     | <b>2.300.000.000,00</b> | <b>4 Objek</b>   | <b>4.600.000.000,00</b> |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi  | 2 Objek   | 1 Objek  | 1.100.000.000,00        | 1 Objek            | 1.100.000.000,00        | 2 Objek  | 2.200.000.000,00        | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan  | 3 Objek   | 1 Objek  | 800.000.000,00          | 1 Objek            | 800.000.000,00          | 2 Objek  | 1.600.000.000,00        | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan  | -   | 1 Objek  | 200.000.000,00          | 1 Objek            | 200.000.000,00          | 2 Objek  | 400.000.000,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.02.0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya  | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                 | 8 Orang   | 10 Orang                                       | 200.000.000,00          | 10 Orang           | 200.000.000,00          | 20 Orang   | 400.000.000,00          | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau               | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.03      | <b>Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi</b>  | <b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang terbit izin membawa ke Luar Daerah Provinsi</b> | <b>-</b>  | <b>2 Objek</b>                                 | <b>48.018.142,00</b>    | <b>2 Objek</b>     | <b>48.018.142,00</b>    | <b>4 Objek</b>   | <b>96.036.284,00</b>    |  |  |        |    |
|        |                                     | 2.22.05.1.03.0002 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi              | -   | 1 Laporan                                      | 48.018.142,00           | 1 Laporan          | 48.018.142,00           | 2 Laporan  | 96.036.284,00           |  | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |    |

| Tujuan                              | Sasaran   | Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |              |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi   |        |    |
|-------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|--|------------------|--------------|------------------|--|-------------------|--|--|--------|----|
|                                     |   |                   |  |  |   | 2025   |                  | 2026         |                  | Target   | Rp                |  |  | Target | Rp |
|                                     |   |                   |  |  |   | Target   | Rp               | Target       | Rp               |  |                   |  |  |        |    |
| 1                                   | 2   | 3                 | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                | 9            | 10               | 11   | 12                | 13   | 14   |        |    |
|                                     |   |                   | UPT MUSEUM SANGNILA UTAMA DAN TAMAN KEBUDAYAAN   |  |   |  | 5.650.000.000,00 |              | 5.800.000.000,00 |  | 11.450.000.000,00 |  |  |        |    |
| MENINGKATKAN PEMAJUAN BUDAYA MELAYU |   |                   |  | Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau   |   | 54,54  |                  | 63,63        |                  | 63,63  |                   |  |  |        |    |
|                                     | Meningkatnya Pelindungan dan pengembangan Budaya Melayu |                   |  | Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi  |   | 82,50  |                  | 84,60        |                  | 84,60  |                   |  |  |        |    |
|                                     |   |                   |  | Persentase Budaya Melayu Riau yang kembangkan  |   | 12,00  |                  | 14,00        |                  | 14,00  |                   |  |  |        |    |
|                                     |   | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan             | PM  | 96 Data OPK                                    | 2.500.000.000,00 | 106 Data OPK | 2.500.000.000,00 | 106 Data OPK   | 5.000.000.000,00  |  |  |        |    |
|                                     |   | 2.22.02.1.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola                               | 2,15%   | 2,24%  | 2.500.000.000,00 | 2,27%        | 2.500.000.000,00 | 2,27%  | 5.000.000.000,00  |  |  |        |    |
|                                     |   | 2.22.02.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan   | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan          | 8 Objek   | 4 Objek  | 1.500.000.000,00 | 4 Objek      | 1.500.000.000,00 | 8 Objek  | 3.000.000.000,00  | UPT. Taman Budaya                            | Kota Pekanbaru, Marpoayan Damai, Tangkerang Tengah |        |    |
|                                     |   | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan            | 520 Orang   | 200 Orang                                      | 500.000.000,00   | 200 Orang    | 500.000.000,00   | 400 Orang  | 1.000.000.000,00  | UPT. Taman Budaya                            | Kota Pekanbaru, Marpoayan Damai, Tangkerang Tengah |        |    |
|                                     |   | 2.22.02.1.01.0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara                  | -   | 1 Unit   | 500.000.000,00   | 1 Unit       | 500.000.000,00   | 2 Unit   | 1.000.000.000,00  | UPT. Taman Budaya                            | Kota Pekanbaru, Marpoayan Damai, Tangkerang Tengah |        |    |
|                                     | Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu                     |                   |  | Nilai Ekspresi Budaya  |   | 47,69  |                  | 49,18        |                  | 49,18  |                   |  |  |        |    |
|                                     | Meningkatnya Warisan Budaya Melayu                      |                   |  | Nilai Warisan Budaya   |   | 57,40  |                  | 58,90        |                  | 58,90  |                   |  |  |        |    |
|                                     |   | 2.22.06           | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum   | PM  | 85 Poin  | 3.150.000.000,00 | 90 Poin      | 3.300.000.000,00 | 90 Poin  | 6.450.000.000,00  |  |  |        |    |
|                                     |   | 2.22.06.1.01      | Pengelolaan Museum Provinsi  | Nilai Akreditasi Museum  | C   | B  | 3.150.000.000,00 | A            | 3.300.000.000,00 | A  | 6.450.000.000,00  |  |  |        |    |
|                                     |   | 2.22.06.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu  | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan          | 450 Unit  | 5 Unit   | 750.000.000,00   | 5 Unit       | 750.000.000,00   | 10 Unit  | 1.500.000.000,00  | UPT. Museum Sang Nila Utama                  | Kota Pekanbaru, Marpoayan Damai, Tangkerang Tengah |        |    |
|                                     |   | 2.22.06.1.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman                                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya           | -   | 5 Orang  | 150.000.000,00   | 5 Orang      | 150.000.000,00   | 10 Orang   | 300.000.000,00    | UPT. Museum Sang Nila Utama                  | Kota Pekanbaru, Marpoayan Damai, Tangkerang Tengah |        |    |
|                                     |   | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum   | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                    | 1 Unit  | 1 Unit   | 1.550.000.000,00 | 1 Unit       | 1.600.000.000,00 | 2 Unit   | 3.150.000.000,00  | UPT. Museum Sang Nila Utama                  | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   |        |    |
|                                     |   | 2.22.06.1.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum  | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia   | -   | 1 Unit   | 200.000.000,00   | 1 Unit       | 250.000.000,00   | 2 Unit   | 450.000.000,00    | UPT. Museum Sang Nila Utama                  | Kota Pekanbaru, Marpoayan Damai, Tangkerang Tengah |        |    |
|                                     |   | 2.22.06.1.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum   | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                   | -   | 1 Unit   | 500.000.000,00   | 1 Unit       | 550.000.000,00   | 2 Unit   | 1.050.000.000,00  | UPT. Museum Sang Nila Utama                  | Kota Pekanbaru, Marpoayan Damai, Tangkerang Tengah |        |    |
|                                     |   |                   |  |  |   |  | 42.261.600.780   |              | 42.501.037.527   |  |                   |  |  |        |    |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Penetapan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*).

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas kebudayaan Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026, maka secara rinci indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk 2 (dua) Tahun 2025-2026 sebagaimana tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Riau  
Tahun 2025-2026

| NO             | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                      | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2022 | Target Capaian Setiap Tahun (Persentase) |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----------------|---|--|--|------------|--|
|                |   |  | Tahun 2025                               | Tahun 2026 |  |
| 1              | Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau (Persen)   | 27,27  | 54,54                                    | 63,63      | 63,63                                  |
| <b>Sasaran</b> |   |  |  |            |  |
| 1.1            | Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persen)                                  | 72,02  | 82,50                                    | 84,60      | 84,60                                  |
| 1.2            | Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan (Persen)                                | 5,22   | 12,00                                    | 14,00      | 14,00                                  |
| 1.3            | Nilai Ekspresi Budaya (Nilai)   | 25,39  | 47,69                                    | 49,18      | 49,18                                  |
| 1.4            | Nilai Warisan Budaya (Nilai)  | 51,75  | 57,40                                    | 58,90      | 58,90                                  |
| <b>Program</b> |   |  |  |            |  |
| 1.1.1          | Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan (Data OPK) | PM   | 96                                       | 106        | 106                                    |
| 1.1.2          | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (Persen)                              | 2,15   | 2,21                                     | 2,24       | 2,24                                   |
| 1.1.3          | Jumlah Sejarah yang dibina (Objek)  | 25   | 50                                       | 50         | 100                                    |
| 1.1.4          | Jumlah cagar budaya yang dilindungi (Objek)   | PM   | 146                                      | 156        | 156                                    |
| 1.1.5          | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum (Poin)                                       | PM   | 85                                       | 90         | 90                                     |

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Sesuai Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 periode Renstra Perangkat daerah yang RPJMD nya berakhir tahun 2024 adalah tahun 2025-2026. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tergantung pada komitmen, sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Kebudayaan dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan dapat terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga perubahan renstra yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

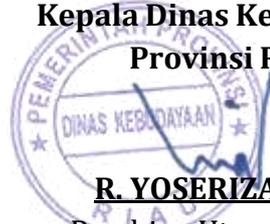
Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026, merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Gubernur Riau.

Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 2 (dua) tahun.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini dapat

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

**Pekanbaru, 06 Februari 2024**  
**Kepala Dinas Kebudayaan**  
**Provinsi Riau**



**R. YOSERIZAL ZEN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681107 199503 1 003

**Formulasi Penghitungan Target Indikator Tujuan dan Sasaran**

**Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026**

| No | Indikator Kinerja Utama                         | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Target 2025                      |       | Target 2026                      |       |
|----|---|--|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|    |   |  | 4                                | 5     | 6                                | 7     |
| 1  | 2   | 3  | 4                                | 5     | 6                                | 7     |
| 1  | Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau          | $\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$   | $\frac{6}{11} \times 100\%$      | 54,54 | $\frac{7}{11} \times 100\%$      | 63,63 |
| 2  | Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi   | $\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$   | $\frac{3143}{3810} \times 100\%$ | 82,50 | $\frac{3223}{3810} \times 100\%$ | 84,60 |
| 3  | Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan | $\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$   | $\frac{460}{3810} \times 100\%$  | 12,00 | $\frac{533}{3810} \times 100\%$  | 14,00 |
| 4  | Nilai Ekspresi Budaya                           | <p>Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Ekspresi Budaya</p> $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5,i} = \frac{S_{5,1} + S_{5,2} + S_{5,3} + S_{5,4}}{4}$ $S_{5,i} = \frac{X_{5,i} - \min(X_{5,i})}{\max(X_{5,i}) - \min(X_{5,i})}, i = 1, 2, 3, 4$                          | 47,69                            |       | 49,18                            |       |
| 5  | Nilai Warisan Budaya                            | <p>Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Warisan Budaya</p> $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4,i} = \frac{S_{4,1} + S_{4,2} + S_{4,3} + S_{4,4} + S_{4,5} + S_{4,6}}{6}$ $S_{4,i} = \frac{X_{4,i} - \min(X_{4,i})}{\max(X_{4,i}) - \min(X_{4,i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ | 57,40                            |       | 58,90                            |       |

**MATRIK VERIFIKASI  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025 - 2026**

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

| NO | BAB                      | SUBSTANSI MATERI   | INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD | HASIL VERIFIKASI |                 |                   |
|----|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|    |                          |  |                            | SESUAI           | PERLU PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1. | <b>COVER</b>             | JUDUL COVER :<br>“RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2026 DINAS/BADAN .....(sesuai Perangkat Daerah masing - masing)   |                            | V                |                 |                   |
| 2. | <b>PERGUB PENETAPAN</b>  | Keputusan Gubernur Riau Nomor : 4 Tahun 2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026  |                            | V                |                 |                   |
| 3. | <b>DAFTAR ISI</b>        | Sesuai dengan sistematika Renstra Perangkat Daaerah  |                            | V                |                 |                   |
| 4. | <b>DAFTAR TABEL</b>      | Judul Tabel dan Halaman Tabel  |                            | V                |                 |                   |
| 5  | <b>DAFTAR GAMBAR</b>     | Judul Gambar dan Halaman Gambar  |                            | V                |                 |                   |
| 6. | <b>BAB I PENDAHULUAN</b> |  |                            |                  |                 |                   |
|    | 1.1. Latar Belakang      | Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. | -                          | V                |                 |                   |

| NO | BAB   | SUBSTANSI MATERI   | INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD | HASIL VERIFIKASI |                 |                   |
|----|---|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|    |   |  |                            | SESUAI           | PERLU PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
|    |   | Tambahan :<br>Narasi Terkait Inmendagri No 3 Tahun 2023  | -                          |                  |                 |                   |
|    | 1.2 Dasar Hukum Penyusunan  | Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.  |                            | V                |                 |                   |
|    | 1.3 Maksud dan Tujuan   | Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah   |                            | V                |                 |                   |
|    | 1.4 Sistematika Penulisan   | Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.   |                            | V                |                 |                   |
| 2. | <b>BAB II<br/>GAMBARAN<br/>PELAYANAN<br/>PERANGKAT<br/>DAERAH</b> | Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. | -                          | V                |                 |                   |

| NO       | BAB  | SUBSTANSI MATERI  | INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD | HASIL VERIFIKASI |                 |                   |
|----------|--|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|          |  |   |                            | SESUAI           | PERLU PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
|          | 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah    | Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). | -                          | V                |                 |                   |
|          | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah                               | Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.   |                            | V                |                 |                   |
|          | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                         | Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.  |                            | V                |                 |                   |
|          |  | Menyajikan Tabel T-C.23 dan T-C.24  |                            | V                |                 |                   |
|          | 2.4 Kelompok Sasaran Layanan                                   | Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)  |                            | V                |                 |                   |
| <b>3</b> | <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> |   |                            |                  |                 |                   |

| NO       | BAB   | SUBSTANSI MATERI  | INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD | HASIL VERIFIKASI |                 |                   |
|----------|---|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|          |   |   |                            | SESUAI           | PERLU PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
|          | 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II  |                            | V                |                 |                   |
|          | 3.2 Isu Strategis                           | Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:<br>- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;<br>Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. |                            | V                |                 |                   |
| <b>4</b> | <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>            |   |                            |                  |                 |                   |
|          | 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah     | - Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.   |                            | V                |                 |                   |
|          |   | Menggunakan Tabel T-C.25  |                            | V                |                 |                   |
|          | 4.2.Cascading Kinerja Perangkat Daerah      | Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing   |                            | V                |                 |                   |
| <b>5</b> | <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>    | Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang, yaitu Tabel T-C.26 yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,  |                            | V                |                 |                   |

| NO | BAB   | SUBSTANSI MATERI   | INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD | HASIL VERIFIKASI |                 |                   |
|----|---|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|    |   |  |                            | SESUAI           | PERLU PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
|    |   | strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.  |                            |                  |                 |                   |
|    |   | Menggunakan Tabel T-C.26   |                            | V                |                 |                   |
| 6  | <b>BAB VI<br/>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> | Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.   |                            | V                |                 |                   |
|    |   | Menggunakan Tabel T-C.27   |                            | V                |                 |                   |
| 7  | <b>BAB VII<br/>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini.</li> <li>- Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.28.</li> </ul> |                            | V                |                 |                   |
|    |   | Menggunakan Tabel T-C.28   |                            | V                |                 |                   |
| 8  | <b>BAB VIII<br/>PENUTUP</b>   | 1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya  |                            | V                |                 |                   |

| NO | BAB      | SUBSTANSI MATERI  | INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD | HASIL VERIFIKASI |                 |                   |
|----|----------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|    |          |   |                            | SESUAI           | PERLU PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
|    |          | ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.<br>2.Kaidah-kaidah pelaksanaan.<br>3.Rencana tindak lanjut.<br>4.Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan |                            |                  |                 |                   |
|    | LAMPIRAN | 1. Formulasi Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan lain - lain yang diperlukan  |                            |                  |                 |                   |

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

1. YUSRI S.Pd.,M.T.,Ph.D

2. EDY YULISMAN, SE.,M.Si

3. ISKANDAR, S.Pd.,MM

Pekanbaru, Februari 2024

Verifikator :

Bappedalitbang Provinsi Riau

1. RAJA JUARISMAN, ST, M.Si

2. NEIL YULIA, S.E, M.Si

3. MUHAMMAD IKHSAN, S.IP

4. NURBAITY, SE